

Analisis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Jambi Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mendapatkan Pembiayaan Bri Syariah

Dr. Rafidah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email:

Addirahman

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email:

Raudati

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah Tahun 2010-2015. Sebagai data awal, penulis menemukan bahwa tidak semua UMKM mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah Tahun 2010-2015. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah selama tahun 2010 sampai 2015 dengan mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank (KKMB), mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil pembiayaan modal ventura meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit pemberdayaan koperasi dan UMKM dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM Kota Jambi. Hambatan tantangan dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah tahun 2010-2015 yaitu menyangkut sumber daya manusia, masih ditemukan adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para pengelola UMKM, Keterbatasan SDM, terutama dari aspek kualitas, berpengaruh pada tingkat profesionalitas manajemen UMKM yang belum optimal erta Permasalahan permodalan tampaknya masih menjadi ganjalan utama dalam pengembangan UMKM.

kata-kata kunci: UMKM, Pembiayaan Syariah

I. Pendahuluan

Pada akhir dasa warsa ini daerah-daerah telah tumbuh dengan sangat pesat dengan ditandai oleh tiga hal. *Pertama*, jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat. *Kedua*, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin berkurang. *Ketiga*, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat.

~~Kawasan perkotaan di Indonesia~~, seperti juga perkotaan di dunia ketiga, banyak dijumpai berkembangnya industri kecil sebagai akibat tidak mampunya pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Beberapa kegiatan industri kecil bahkan masuk dalam sektor informal. Namun keberadaan mereka belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada umumnya pemerintah daerah sebagai pengelola kota masih banyak memikirkan sektor formal yang lebih mudah dikontrol. Padahal sektor industri kecil (dan menengah) memiliki kontribusi yang nyata bagi pengatasan masalah pengangguran dan masalah perekonomian kawasan perkotaan.

Dalam pembahasan mengenai sektor usaha kecil tentunya tidak terlepas dengan permasalahan urbanisasi dan migrasi ataupun pengangguran. Kenyataan baru tersebut adalah terjadinya arus urbanisasi dan migrasi yang melanda negara-negara di dunia secara besar-besaran. Adanya perpindahan atau mobilisasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan tersebut secara berkait mau tidak mau adalah karena akibat strategi pembangunan yang dijalankan. Terlepas dari terdapatnya implikasi baik positif maupun negatif yang ditimbulkan, ternyata keberadaan urbanisasi dan migrasi menjadikan suatu kasus tersendiri yang mutlak memerlukan pengelolaan dan perencanaan dari sisi kebijakan ekonomi (*economic policy*).

Permasalahan urbanisasi dan migrasi dianggap sebagai kekuatan yang terus menerus memperburuk masalah pengangguran di perkotaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan struktural dan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan, dimana ~~lokasi perkotaan terus~~ diberi insentif untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sementara lokasi pedesaan justru makin lama makin dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan untuk akselerasi tingkat kemajuannya.¹ Dengan begitu, terjadinya proses urbanisasi dan migrasi tersebut pada hakekatnya merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain, dan untuk itu terdapat argumentasi bahwa model pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini tidak mengarahkan adanya suatu hasil atau pemerataan sejajar antar wilayah di daerah yang sama; dalam hal ini antara wilayah pedesaan dan perkotaan.⁵ Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labor*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.²

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah

¹ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.

² Anonim, *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014

terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Sejak masa Orde Baru di Indonesia, pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mutlak diperlukan dalam upaya membangun perekonomian nasional karena merupakan amanat kontitusi. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM semakin jelas, di mana pemerintah terus berupaya meningkatkan peran dan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain, dengan menetapkan bahwa pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memperluas dan mengatur usahanya, dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan ketrampilan dan membantu pemasaran hasil produksinya.

Dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah, Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah Perbankan Syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UKM. Sebab, sektor UKM memiliki daya tahan yang lebih kuat di banding sektor lain.

Tabel 1
Perkembangan UMKM Kota Jambi

Tahun	UMKM	Persentase (%)	Tenaga Kerja	Persentase (%)
2010	11.852	2%	32.021	3%
2011	10.869	1,1%	31.864	0,4%
2012	10.356	4%	30.607	0,4%
2013	10.024	3%	29.898	3%
2014	10.274	2.4%	30.664	2,5%
2015	10.556	2,7%	31.507	2,75%

Sumber:Dinas Koperasi dan UMKM

Adapun macam- macam produk pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah cabang Jambi diantaranya:

1. Mikro Ib 25 yang mana produk ini menawarkan jumlah pembiayaannya yang bernilai 5 - 25 juta tanpa jaminan dengan tenor 6 - 12 bulan
2. Mikro Ib 75 yang mana produk ini menawarkan jumlah pembiayaannya yang bernilai 5 - 75 juta tanpa jaminan dengan tenor 6 - 36 bulan
3. Mikro Ib 25 yang mana produk ini menawarkan jumlah pembiayaannya yang bernilai 75 - 500 juta tanpa jaminan dengan tenor 6 - 60 bulan

Tabel 2

Jumlah UMKM dan Pembiayaan pada BRI Syariah Cabang Jambi Tahun 2010-2015¹⁰

No	Tahun	UMKM	Pembiayaan
1	2010	574	39.664.000.000,-
2	2011	587	40.213.000.000,-
3	2012	605	42.121.000.000,-
4	2013	642	45.464.000.000,-
5	2014	742	51.265.000.000,-
6	2015	994	68.545.000.000,-

Sumber: BRI Syariah cabang Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan BRI syariah terus berkembang dari tahun ke tahun.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi selama ini sudah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM di masyarakat berkembang dan bank syariah juga sudah menyalurkan bantuan modal yang besar kepada masyarakat. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi sudah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Selama ini pihak Dinas sudah memberikan perbaikan bagi ekonomi masyarakat, meskipun tidak sedikit yang gagal membangun pondasi ekonominya. Permasalahan lain di mana penyaluran dana dari bank yang ada sebagian besar sudah tepat sasaran, meskipun pihak bank perlu menindaklanjuti penyaluran dana kepada setiap unit UMKM dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.

II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

b. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pembiayaan BRI Syariah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Semenrtara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM

dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.53 Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional dilakukan dengan mendorong pemberian kredit modal usaha kepada UMKM. Berdasarkan wawancara dengan Arzi Efendi, Kepala

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi yang mengatakan bahwa dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. Pertama, tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. Kedua, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Ketiga, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. Keempat, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan lembaga pemberi kredit memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi.

Namun dari beberapa hal yang melatar belakangi seperti tersebut di atas, masih belum cukup menjadi landasan keyakinan bahwa pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam hal pengajuan fasilitas kredit modal usaha ke lembaga-lembaga pemberi kredit baik perbankan maupun non perbankan. Hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal pengajuan kredit usaha.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah adalah kemudahan akses permodalan mengoptimalkan peran Konsultan

—Keuangan—Mitra Bank (KKMB) bertujuan agar UMKM mudah mendapatkan akses permodalan. Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) adalah lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya. Jasa yang diberikan adalah jasa konsultansi dalam hal manajemen/analisis keuangan

agar terjadi kemitraan dengan bank atau terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut. Dalam hal ini termasuk pendampingan pada saat menyusun proposal kredit, menghubungkan ke lembaga pembiayaan/bank dan melakukan monitoring sejak saat pencairan kredit sampai pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Berdasarkan wawancara dengan Edi Fahrizal, Kabid UMKM Kota Jambi yang mengatakan bahwa fungsi dan tanggung jawab KKMB adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Pembinaan disini dimaksudkan adalah merupakan satu kesatuan proses yang di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, memelihara dan megembangkan. Proses pelaksanaan

pembinaan oleh KKMB dilakukan secara partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan (materi, metode dan lain-lain) harus selalu bertumpu pada kebutuhan UMKM, oleh karenanya hubungan kerja antara KKMB dengan UMKM bukanlah sebagai atasan dan bawahan atau hubungan antara pembina dengan yang dibina. Hubungan yang terjalin adalah sejajar dan KKMB disini berperan sebagai motivator bagi UMKM. Bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan disini adalah melakukan pendampingan terhadap UMKM dengan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan sesuai kebutuhan, arahan dan konsultasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut seorang KKMB dalam pelaksanaannya di lapangan berpedoman pada beberapa langkah sebagai berikut :³

- a. Melakukan identifikasi pada calon nasabah UMKM di wilayah/sentra/populasi usaha
- b. Menentukan kelompok bila memperoleh calon nasabah mikro dalam rangka efisiensi
- c. Menyusun proposal kredit (usaha mikro) atau Kelayakan usaha (usaha kecil dan menengah)
- d. Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan
- e. Melakukan monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit.⁵⁶

Diharapkan dengan adanya optimalisasi peran dari KKMB, persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga penyalur kredit, tidak lagi menjadi kendala bagi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha. Keberhasilan dari pendekatan ini akan nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit modal usaha, dan mampunya KKMB beroperasi secara bisnis (saling menguntungkan) sehingga dapat membiayai dirinya sendiri. ⁴

Bagi beberapa UMKM yang merasa terbebani dengan suku bunga tinggi, kebutuhan modal usaha dapat diajukan ke lembaga pembiayaan yang menerapkan pola kerjasama dengan bagi hasil. Dimana return yang diberikan UMKM sesuai dengan hasil yang didapatkan UMKM pada saat itu sehingga UMKM tidak terbebani dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Lembaga pembiayaan yang menerapkan pola bagi hasil adalah Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura dengan konsep bagi hasil murni ataupun bagi hasil terkelola.

Berdasarkan wawancara dengan Edi Fahrizal, Kabid UMKM Kota Jambi yang mengatakan bahwa dari segi karakteristik Modal Ventura yang bersifat Gain Risk (cenderung lebih berani mengambil resiko), pembiayaan ini memiliki prosedur yang lebih longgar dan lebih mengutamakan prospek dan potensi usaha UMKM dalam pengembangannya. Pembiayaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang (maksimal 4 tahun). Pembiayaan modal ventura tidak hanya menyalurkan dana-dana yang berasal dari pemegang saham dan pinjaman perbankan tetapi juga ikut menyalurkan dana-dana program pemerintah dengan rate yang lebih murah daripada rate kredit komersil. Adapun dana-dana program yang disalurkan oleh perusahaan Modal Ventura antara lain seperti dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan

³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.

⁴ Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Dana PKBL (Program Kemitraaan Bina Lingkungan) dari PT. Bahana Artha Ventura dan LPEI (Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia).

Diharapkan dengan digiatkannya sosialisasi pembiayaan modal ventura, UMKM yang memiliki permasalahan dalam hal bunga kredit tetap mendapatkan kredit modal usaha baik dalam bentuk kerjasama pembiayaan pola bagi hasil ataupun kredit program LPDB dan PKBL.

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perkreditan UMKM adalah skim penjaminan kredit. Menurut Fahrurrozi, Kasi Kemitraan dan Jaringan Usaha UMKM Kota Jambi yang mengatakan bahwa dalam skema tersebut, bank dan perusahaan penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari lembaga penyalur kredit mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil analisis kelayakan, usaha dinyatakan layak (*feasible*), namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (tidak *bankable*), maka bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Selanjutnya Perusahaan Penjamin akan melakukan analisa kelayakan. Apabila Kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka Perusahaan Penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Pertumbuhan Ekonomi juga memicu pertumbuhan PKL yang ada di Kota Jambi, karena itu Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan penertiban terhadap PKL guna mengantisipasi dampak yang muncul akibat penambahan PKL tersebut dengan membuat *auning* bagi PKL. Adapun kegiatan Penataan PKL. Yang pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Jambi adalah :

- a. Relokasi PKL di Jl. H. Agus Salim ke Lokasi Taman Remaja Kelurahan Paal V (lima) Kecamatan Kotabaru sebanyak 34 Lapak PKL.
- b. Relokasi PKL kelokasi Depan Gedung Olah Raga Persijam Jambi Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebanyak 34 Lapak PKL.
- c. Relokasi PKL Kelokasi depan Gedung Rumah Sakit Raden Mataher Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanaipura Kota Jambi sebanyak 36 Lapak.
- d. Pembuatan Tenda bagi para PKL yang berada disamping Xaverius Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar Jambi.
- e. Pemberian Bantuan Gerobak PKL sebanyak 152 Gerobak kepada anggota Koperasi Tanggo Rajo di Taman Tanggo Rajo Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- f. Relokasi PKL di Jl. H. Agus Salim ke Lokasi Taman Remaja Kelurahan Paal V (lima) Kecamatan Kotabaru sebanyak 34 Lapak PKL.
- g. Relokasi PKL kelokasi Depan Gedung Olah Raga Persijam Jambi Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebanyak 34 Lapak PKL.
- h. Relokasi PKL Kelokasi depan Gedung Rumah Sakit Raden Mataher Kelurahan Telanai Pura Kec. Telanaipura Kota Jambi sebanyak 36 Lapak.
- i. Pembuatan Tenda bagi para PKL yang berada disamping Xaverius Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar Jambi.
- j. Pemberian Bantuan Gerobak PKL sebanyak 152 Gerobak kepada anggota Koperasi Tanggo Rajo di Taman Tanggo Rajo Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.⁶³

Berdasarkan DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Jambi Kegiatan Penataan PKL yang akan dilakukan Pada TA 2014 yaitu:

- a. Pembuatan Auning dilokasi Samping Bang Indonesia Kelurahan Telanai kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
- b. Pembuatan Auning dilokasi Samping Kantor Camat Telanai Pura Kelurahan Telanai Pura Kecamatan Telanai Pura.
- c. Pembuatan Auning dilokasi Samping Bang Indonesia Kelurahan Telanai kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

- d. Pembuatan Auning dilokasi Samping Kantor Camat Telanai Pura Kelurahan Telanai Pura Kecamatan Telanai Pura.

B. Hambatan dan Tantangan dinas koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pembiayaan BRI Syariah

Salah satu karakteristik UMKM, khususnya usaha mikro adalah mudahnya bagi pelaku usaha mikro untuk membuka dan memberhentikan usahanya. Menurut Kepala Dinas bahwa Dengan jumlah aparatur yang berada di bidang UMKM sebanyak 5 (lima) orang PNS dan dibantu 1 (satu) orang tenaga kontrak, merupakan kendala dalam penyajian data UMKM. Di samping itu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan survey lapangan di 8 (delapan) kecamatan menjadi kendala, dimana seyogyanya pihak SKPD harus bekerja sama dengan tingkat Kelurahan bahkan tingkat RT. Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan jumlah aparatur yang berada di bidang UMKM sebanyak 5 (lima) orang PNS dan dibantu 1 (satu) orang tenaga kontrak, merupakan kendala dalam penyajian data UMKM. Di samping itu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan survey lapangan di 8 (delapan) kecamatan menjadi kendala, dimana seyogyanya pihak SKPD harus bekerja sama dengan tingkat Kelurahan bahkan tingkat RT Data UMKM di akhir tahun 2009 tercatat sebanyak 12.000 UMKM, namun untuk mendapatkan data akurat dilakukan survey ulang di tahun 2013, dan sampai dengan bulan Desember 2013 tercatat sebanyak 10.024 UMKM, meskipun terus dilakukan pendataan, namun hal ini menunjukkan bahwa data UMKM sangat mudah berubah setiap saat.

Kurangnya Kerjasama Antara SKPD Dengan *Stakeholder* Terkait Untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing diperlukan pendekatan yang berkelanjutan serta meliputi berbagai aspek, yakni aspek usaha seperti penguatan dalam bidang permodalan, SDM, produksi, keuangan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, jaringan usaha serta perizinan.

Pemberdayaan PKL Belum Diimbangi Dengan Peraturan yang Berlaku Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu diikuti dengan peraturan di daerah yang mengikuti aturan tersebut. Menurut Edi Fahrizal, Kabid UMKM Kota Jambi yang mengatakan bahwa: Hal ini merupakan kendala dan sampai dengan akhir tahun 2013, belum ada sinkronisasi masalah pemberdayaan PKL di Kota Jambi, sehingga masih ada keterbatasan bagi SKPD untuk mengimplementasikan ketentuan yang lebih tinggi.⁷² Dengan penghambat ini, maka pengembangan usaha UMKM di Kota Jambi belum maksimal.

III. Penutup

Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah selama tahun 2010 sampai 2015 dengan mengoptimalkan memberi kemudahan akses modal dengan cara meningkatkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil pembiayaan modal ventura meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit pemberdayaan koperasi dan UMKM. Peran lain yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan sumber daya manusia, jaringan usaha dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM Kota Jambi. Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan BRI Syariah tahun 2010-2015 menghadapi hambatan dan tantangan dalam bentuk hambatan belum dimilikinya data seluruh potensi UMKM secara akurat, kurangnya kerjasama antara SKPD dengan *stakeholder* terkait. pemberdayaan PKL belum diimbangi dengan peraturan yang berlaku dan tantangan kualitas sumber daya manusia UMKM dan pengetahuan dan pemahaman manajemen para pengelola UMKM.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.

Anonim, *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM*, Kota Jambi: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2013.

Dini Arwati, "Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi UMKM", *Jurnal Ekono Insentif Kopwil4*, Volume 4 No. 1, Juli 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jaka Sriyana, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: gema Insani, 2001.

Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudaryanto, dkk. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, FE Universitas Negeri Jember.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Supriyanto, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. FISE Universitas Negeri Yogyakarta

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.

Yustinus Prastowo, dkk., *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek*, Jakarta: INFID, 2014.